



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
TAHUN 2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendahuluan

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024. Seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi pandemic covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di Kota Bogor di tahun 2020 maupun tahun tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 baik dalam hal arah kebijakan, strategi maupun prioritas pembangunan daerah kota Bogor di sisa masa berlaku RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan nasional yang ada setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, juga berkonsekuensi terhadap perlunya penyesuaian penyesuaian baik dari sisi regulasi maupun arah kebijakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 342 mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
3. terjadi perubahan yang mendasar.

Atas dasar kondisi dan pertimbangan diatas, maka dilakukan perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dilakukan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan RPJMD sesuai dengan amanat PMDN nomor 86 Tahun 2017 pasal 344, berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud, diawali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup:

- a. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 sampai dengan Tahun 2020;
- b. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis yang diakibatkan oleh adanya perubahan mendasar;
- c. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

- d. perumusan tujuan dan sasaran;
- e. perumusan perubahan strategi dan arah kebijakan;
- f. perumusan perubahan program pembangunan Daerah; dan
- g. KLHS.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri No 7/2018, UU No 32/2009, PP 46/2016, Permen LHK No 69/2017 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS untuk memastikan bahwa prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang dilakukan dengan pendekatan *ex-ante*. Dalam hal ini, KLHS menjadi instrumen wajib yang memberikan rekomendasi dalam penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

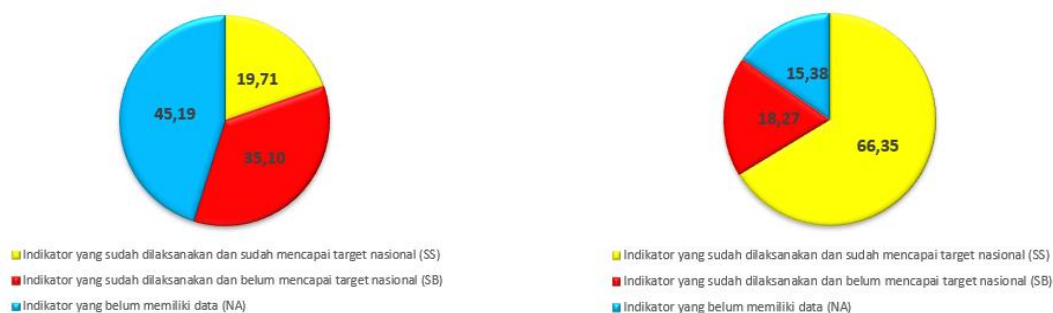
2. Cakupan Wilayah

Lingkup wilayah mencakup wilayah administratif Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan dan 68 Kelurahan dengan luas wilayah **11.138,42 Ha**.

3. Capaian TPB

Secara umum terdapat sekitar 84,62% dari 208 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor yang telah diisi. Sementara 15,38% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kota telah dilaksanakan oleh Kota Bogor sebanyak 208 indikator, dimana 138 indikator atau sekitar 66,35% telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 38 indikator atau sekitar 18,27% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 32 indikator atau 15,38% belum ada datanya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan TPB setidaknya indikator yang sudah diisi dan mencapai target masih lebih banyak dibandingkan dengan indikator yang belum mencapai target dan tidak terisi. Hal ini juga menunjukkan perkembangan yang baik perihal capaian dan ketersediaan data SDGs dari penyusunan KLHS RPJMD yang dilakukan sebelumnya. Dimana pada tahun penyusunan yang dilakukan tahun 2019, terdapat sekitar 54,81% dari 208 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor yang telah diisi. Sementara 45,19% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Untuk lebih jelas persentase capaian TPB dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1 Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2019 dan 2021

Sumber: Hasil analisis, 2021

4. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

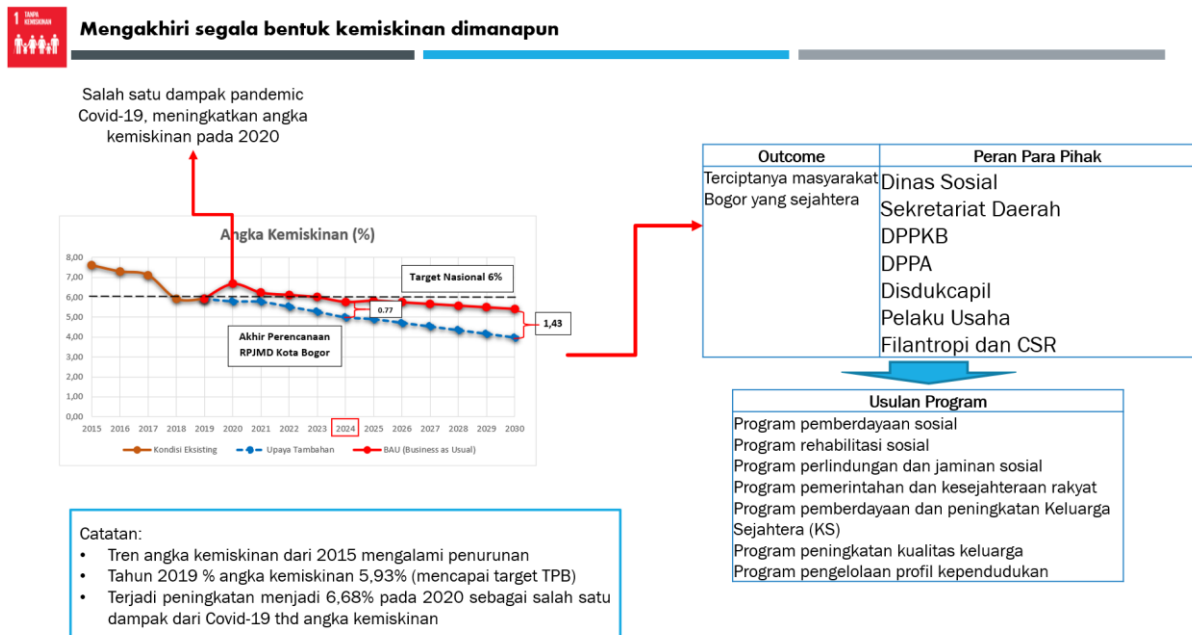
Perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas adalah sebagai berikut:

 <p>1 TANPA KEMISKINAN Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun</p>	 <p>8 PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p>
 <p>2 TANPA KELAPARAN Mengakhiri <u>kelaparan</u>, mencapai <u>ketahanan pangan</u> dan perbaikan <u>nutrisi</u>, serta menggalakkan <u>pertanian yang berkelanjutan</u></p>	 <p>10 MENURUNKAN KETIMPANGAN <u>Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara</u></p>
 <p>3 KEMISKINAN SEHAT DAN KESEJAHTERAAN Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p>	 <p>11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELAJUTAN Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</p>
 <p>6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p>	

Gambar 2 TPB yang menjadi Isu Prioritas dalam KLHS Revisi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

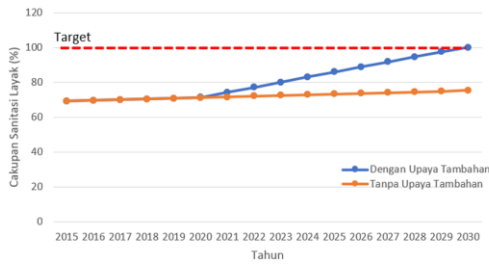
5. Skenario Pencapaian TPB

Untuk sepenuhnya mencapai target TPB yang diharapkan oleh Kota Bogor, perlu upaya tambahan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan hingga tahun 2024. Upaya yang direkomendasikan diharapkan dapat dilaksanakan untuk menangani permasalahan sebagaimana 7 TPB Prioritas di Kota Bogor. berikut merupakan scenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas di Kota Bogor.





Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun



Catatan:

- Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak th 2018 66%
- Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak th 2020 70,9%
- Target Nasional 100%

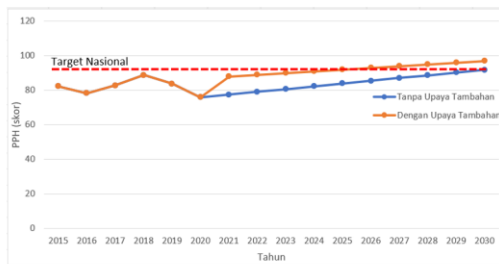
Outcome	Peran Para Pihak
Meningkatnya layanan sanitasi layak di Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Permukiman Dians Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Kesehatan Pengelola IPLT Pegiat Lingkungan

Usulan Program

- Program Pengelolaan dan Pengembangan system Air Limbah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh



Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan (1)



Catatan:

- Skor PPH Tahun 2018 senilai 82,7
- Skor PPH Tahun 2020 senilai 83,70
- Target skor pph sebesar 92,5

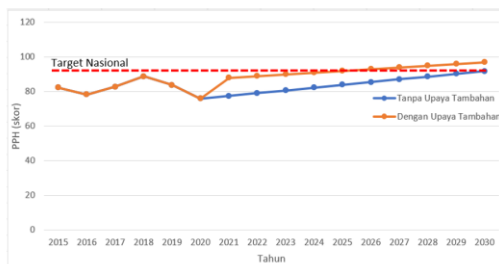
Outcome	Peran Para Pihak
Terpenuhinya Pola Pangan Harapan Kota Bogor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kesehatan Bappeda Dinas PUPR Pegiat Urban farming

Usulan Program

- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program penyuluhan pertanian
- Program pengelolaan perikanan budidaya



Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan (1)



Catatan:

- Skor PPH Tahun 2018 senilai 82,7
- Skor PPH Tahun 2020 senilai 83,70
- Target skor pph sebesar 92,5

Outcome	Peran Para Pihak
Terpenuhinya Pola Pangan Harapan Kota Bogor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Kesehatan Bappeda Dinas PUPR Pegiat Urban farming

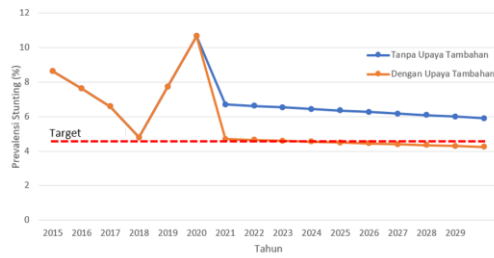
Usulan Program

- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program penyuluhan pertanian
- Program pengelolaan perikanan budidaya

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024**



Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan (2)



Catatan:

- Prevalensi stunting Tahun 2018 senilai 4,8%
- Prevalensi stunting Tahun 2020 senilai 10,66%
- Target prevalensi stunting secara nasional "menurun"
- Target Prevalensi stunting Kota Bogor senilai 4,55%

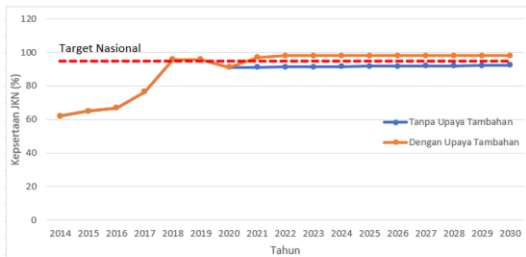
Outcome	Peran Para Pihak
Berkurangnya prevalensi stunting Kota Bogor	Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial BPJS Kesehatan Puskesmas di Kota Bogor RSUD Kota Bogor Posyandu di Kota Bogor

Usulan Program

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
Program peningkatan keluarga sejahtera



Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia



Catatan:

- Tahun 2016 jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 66%
- Tren meningkat hingga terjadi penurunan dari tahun 2016 hingga di tahun 2019 sebesar 94,02%
- Target Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Minimal Sebesar 95%

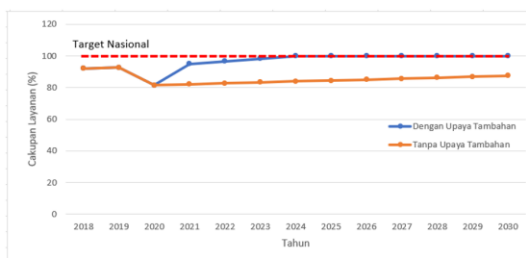
Outcome	Peran Para Pihak
Terpenuhinya layanan Kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan BPJS Kesehatan Dinas Sosial Disdukcapil Puskesmas dan Klinik di Kota Bogor Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Usulan Program

Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman



Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua



Catatan:

- Tahun 2018 akses layanan air minum aman dan berkelanjutan sebesar 91,44%
- Tahun 2020 akses layanan air minum aman dan berkelanjutan sebesar 95,5%
- Target pemenuhan layanan terhadap layanan air minum aman dan berkelanjutan sebesar 100%

Outcome	Peran Para Pihak
Terpenuhinya layanan Air Bersih untuk Masyarakat Kota Bogor	a. Dinas PUPR b. PDAM Kota Bogor c. Dinas Perumahan dan Permukiman d. Dinas Lingkungan hidup e. Bappeda

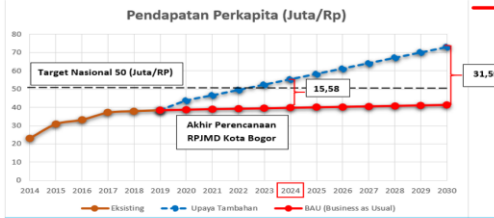
Usulan Program

Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)
Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum
Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (1)



Outcome	Peran Para Pihak
Terciptanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita Kota Bogor	Dinas Koperasi dan UMKM DPMPSTP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Bappeda Bappenda BUMD Koperasi Pelaku Usaha di Kota Bogor

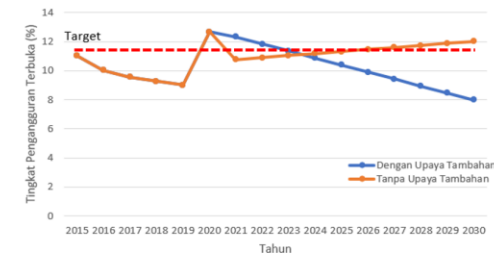


Usulan Program
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi Program pemberdayaan UMKM Program pengembangan UMKM Program iklim penanaman modal Program promosi penanaman modal Program pelayanan penanaman modal Program peningkatan daya Tarik dan destinasi wisata Program pemasaran pariwisata Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif Program perizinan dan pendaftaran perusahaan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program standarisasi dan perlindungan konsumen Program perekonomian dan pembangunan Program penelitian dan pengembangan daerah Program pengelolaan pendapatan daerah

Catatan:

- Tahun 2018 LPE Kota Bogor 6,04%
- Tahun 2020 LPE Kota Bogor menurun drastis menjadi -0,51%
- Pendapatan perkapita tahun 2020 sebesar 39,80 (juta/Rp)

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (2)



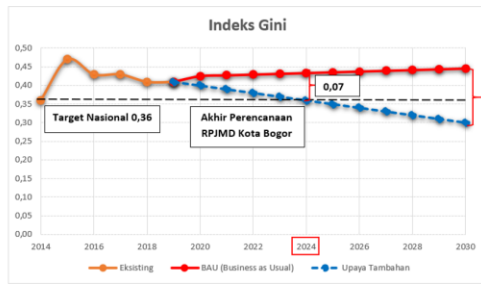
Outcome	Peran Para Pihak
Terciptanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita Kota Bogor	Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kebudayaan dan pariwisata Pelaku Usaha di Kota Bogor Bappeda

Usulan Program
Program pelatihan tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja Program hubungan industrial Program pengembangan UMKM Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Catatan:

- Tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka 9,57 %
- Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka 12,68 %
- Peningkatan terjadi sebagai dampak dari pandemic Covid-19
- Target nasional untuk Pengangguran Menurun

Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara

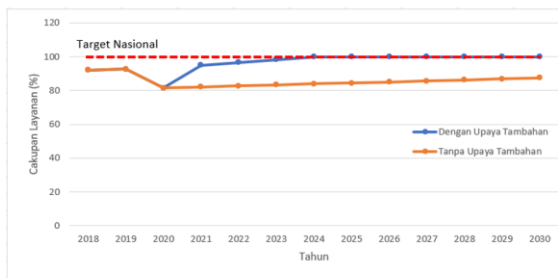


- Catatan:
- Tahun 2018 indeks gini sebesar 0,43
 - Tahun 2020 indeks gini sebesar 0,412
 - Target menurun hingga 0,36

Outcome	Peran Para Pihak
Berkurangnya ketimpangan di Kota Bogor	a. Bappeda b. Dinas Sosial c. Dinas Tenaga Kerja d. Dinas Koperasi dan UMKM e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan f. Pelaku Usaha di Kota Bogor

Usulan Program
Program perlindungan dan jaminan sosial Program perencanaan tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja Program hubungan industrial Peningkatan sarana distribusi perdagangan Program pemberdayaan UMKM Program pengembangan UMKM Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Program penelitian dan pengembangan daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah • Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan



- Catatan:
- Tahun 2018, persentase sampah kota yang tertangani 74,38%
 - Tahun 2020, persentase sampah kota yang tertangani 77,20%
 - Target minimum sampah kota terlayani 80%

Outcome	Peran Para Pihak
Terciptanya Lingkungan Kota Bogor yang babas sampah	a. Dinas Lingkungan Hidup b. Dinas PUPR c. Dinas Perumahan dan Permukiman d. Bappeda e. Dinas Pendidikan f. Dinas Kesehatan g. Penggiat Lingkungan dan Bank sampah

Usulan Program
Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Program pengelolaan persampahan Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

6. Integrasi KLHS Terhadap Revisi RPJMD

Tujuan	Indikator	Rekomendasi	Integrasi Kedalam RPJMD				
			Kondisi	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Kebijakan
TPB 1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> Program pemberdayaan sosial Program rehabilitasi sosial Program perlindungan dan jaminan sosial Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program peningkatan kualitas keluarga Program pengelolaan profil kependudukan 	6,68%	Permasalahan bidang Kemiskinan: Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program (IV-33)	Prosentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi (IV-113) Tingkat Kemiskinan masing tinggi (IV-114)	Tujuan Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat (V-23) Sasaran Menurunnya Kemiskinan (V-23)	Strategi Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin terdampak pandemic Covid-19 (VI-22) Kebijakan a. Menjamin adanya perlindungan social bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terdampak pandemic Covid-19 (VI-22) b. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin (VI-22) c. Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Miskin (VI-22)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan dan Pengembangan system Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 	Tahun 2020 70,9%	Permasalahan bidang perumahan dan permukiman: Belum tuntasnya penanganan Kawasan kumuh (IV-30)	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih belum optimal (IV-22)	Tujuan Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (V-18) Sasaran: % Rumah Tangga Ber PHBS (V-18)	Strategi Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif serta penyehatan lingkungan (VI-8) Kebijakan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat (VI-8) Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan (VI-8)
TPB 2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program penanganan kerawanan pangan Program pengawasan keamanan pangan Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan 	83,70	Permasalahan bidang Pangan: Cadangan pangan Kota Bogor masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan.KN.130/4/2018 (IV-38) 8,47% produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang tidak aman dan layak	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (IV-113)	Tujuan Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas (V-18) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (V-18)	Strategi: Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat (VI-7) Kebijakan: Peningkatan kecukupan konsumsi energy dan protein pada asupan pangan masyarakat (VI-7)

Tujuan	Indikator	Rekomendasi	Integrasi Kedalam RPJMD				
			Kondisi	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Kebijakan
		prasarana pertanian • Program penyuluhan pertanian • Program pengelolaan perikanan budidaya		konsumsi (IV-39) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan (IV-44) Permasalahan bidang Pertanian: Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian (IV-57)			
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	• Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan • Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan • Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan • Program peningkatan keluarga sejahtera	10,66	Permasalahan bidang Kesehatan: Permasalahan Stunting dan Status Gizi Bayi Dan Balita (IV-11))	Prevalensi ketidakcukupan pangan (IV-113)	Tujuan Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas (V-18) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (V-18)	Strategi: Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat (VI-7) Kebijakan: Menjamin Kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita (VI-8)
TPB 3	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	• Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat • Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan • Program pemberdayaan masyarakat bidang	94,02	Permasalahan bidang Kesehatan: Angka Kesakitan yang masih cukup tinggi (IV-8) Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin (IV-20)	pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN belum optimal (IV-113)	Tujuan Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas (V-18) Sasaran	Strategi: Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu (VI-6) Kebijakan: Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (VI-6)

Tujuan	Indikator	Rekomendasi	Integrasi Kedalam RPJMD				
			Kondisi	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Kebijakan
		kesehatan • Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (V-18)	Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (VI-6) Kolaborasi pembiayaan Kesehatan Masyarakat (VI-6)
TPB 6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengelolaan sumberdaya air (SDA) • Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum • Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah 	95,5%	Permasalahan bidang kesehatan: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih belum optimal (IV-22) Permasalahan Bidang PUPR: Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk (IV-28)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak belum mencapai 100% (IV-115)	Tujuan Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas (V-18) Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman (VI-19)	Strategi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman (VI-9) Kebijakan: a. Menyediakan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan (VI-9) b. Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas (VI-9) c. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat (VI-9)
TPB 8	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Program pemberdayaan UMKM • Program pengembangan UMKM • Program penanaman modal • Program promosi penanaman modal • Program pelayanan penanaman modal • Program peningkatan daya Tarik dan destinasi wisata • Program pemasaran pariwisata • Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif 	LPE - 2,32% Pendapatan per kapita 39,80 jt rupiah	Permasalahan bidang Bidang Perindustrian: Proses Produksi yang Inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk (IV-58) Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah(IV-58) Sinergitas industry kecil dengan industry besar belum optimal, dan Keberadaan industry kecil belum dapat menjadi bageian dari ranati produksi industry besar(IV-59)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal (IV-122) • Penguatan sistem kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi sebagai upaya penanganan Covid 19 (IV-149) 	Tujuan: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah (VI-24) Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (VI-25)	Strategi: Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah (VI-25) Kebijakan: a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local (VI-25) b. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas (VI-25) c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi (VI-25) d. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah (VI-25) e. Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar

Tujuan	Indikator	Rekomendasi	Integrasi Kedalam RPJMD				
			Kondisi	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Program perizinan dan pendaftaran perusahaan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program standardisasi dan perlindungan konsumen Program perekonomian dan pembangunan Program penelitian dan pengembangan daerah Program pengelolaan pendapatan daerah 		<p>Permasalahan bidang Bidang Perdagangan: Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor (IV-58)</p> <p>Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor(IV-58)</p> <p>Permasalahan bidang Bidang Penanaman Modal: Investasi Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah; (IV-52)</p>			<p>dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional (VI-26)</p> <p>f. Meningkatkan daya saing Koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) (VI-26)</p> <p>g. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan supply dan demand, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen (VI-26)</p> <p>h. Revitalisasi pasar tradisional</p> <p>i. Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah (VI-26)</p> <p>j. Pengembangan Pemasaran UMKM melalui Pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan supply produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan Chanel distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan demand terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf (VI-26)</p>
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> Program pelatihan tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja Program hubungan industrial Program pengembangan UMKM Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah 	12,68	<p>Permasalahan bidang Kesehatan: Terjadinya Pandemi Covid 19 (IV-18)</p> <p>Permasalahan bidang Kemiskinan: Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program (IV-33)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9.10% meningkat menjadi 12,68% (IV-150) 	<p>Tujuan: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat (V-24)</p> <p>Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran (V-24)</p>	<p>Strategi: Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional (VI-21)</p> <p>Kebijakan:</p> <p>a. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar (VI-21)</p> <p>b. Mengembangkan Inkubator Bisnis (VI-21)</p> <p>c. memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah (VI-21)</p> <p>d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja (VI-22)</p> <p>e. Kerjasama hubungan industrial dalam rangka</p>

Tujuan	Indikator	Rekomendasi	Integrasi Kedalam RPJMD				
			Kondisi	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Kebijakan
				<p>Permasalahan bidang Tenaga Kerja: TPT sebesar 9.57 persen di tahun 2017, dan dimasa pandemic ini pengangguran makin meningkat dimana TPT menjadi 12.68%; (IV-34)</p> <p>Permasalahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah (IV-38)</p>			<p>peningkatan penyerapan tenaga kerja (VI-22) f. Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja (VI-22)</p>
TPB 10	Koefisien Gini	<ul style="list-style-type: none"> • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program perencanaan tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja • Program hubungan industrial • Peningkatan sarana distribusi perdagangan • Program pemberdayaan UMKM • Program pengembangan UMKM • Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan • Program penelitian dan pengembangan daerah • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah 	0,36	<p>Permasalahan bidang Koperasi dan UMKM: UMKM dan IKM belum berdaya saing tinggi (IV-48) Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah (IV-50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks koefisien gini masih tinggi (IV-114) • Isu strategis pembangunan manusia yang berkeadilan (IV-118) 	<p>Tujuan: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat (V-23)</p> <p>Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran (V-23) Menurunnya tingkat kemiskinan (V-23)</p>	<p>Strategi: Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional (VI-21)</p> <p>Kebijakan: a. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar (VI-21) b. Mengembangkan Inkubator Bisnis (VI-21) c. memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah (VI-21) d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja (VI-22) e. Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja (VI-22) f. Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja (VI-22)</p>

Tujuan	Indikator	Rekomendasi	Integrasi Kedalam RPJMD				
			Kondisi	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Kebijakan
TPB 11	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Program pengelolaan persampahan Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	80%	Permasalahan bidang Lingkungan: Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota (IV-55) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir belum berjalan sinergis (IV-45)	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal didaerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Persentase sampah perkotaan yang tertangani Prosentase Pelayanan /Prosentase Volume Sampah Terangkut Ke TPA Prosentase Pelayanan /Prosentase Volume Sampah Terangkut Ke TPA Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%) 	<p>Tujuan: Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas (V-18)</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman (V-19)</p>	<p>Sasaran: Reduksi timbulan sampah (VI-11)</p> <p>Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional (VI-11) Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat (VI-11) Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah (VI-11) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar (VI-11)